

RELEVANSI PROGRAM PEMERINTAH DI BIDANG PENDIDIKAN GUNA MENGURANGI KEMISKINAN DI DESA MANDUAMAS

Gracia Putri Munthe¹⁾, Derselli Pranitha Silitonga²⁾

^{1,2)} Konseling Pastoral, Sekolah Tinggi Diakones HKBP

Email Korespondensi: ¹⁾graciamunthe19@gmail.com ²⁾pranithaderselli@gmail.com

Abstract

Artikel ini ditulis untuk membahas tentang relevansi program pemerintah dibidang pendidikan dalam mengurangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia terkhususnya di Desa Manduamas. Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap individu harus memperoleh pendidikan. Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam memperhatikan kesejahteraan seluruh rakyatnya terlebih bagi masyarakat yang kurang mampu. Program yang direalisasikan oleh pemerintah merupakan bagian dari kebijakan dalam menangani permasalahan sosial yang terjadi salah satunya kemiskinan. Program pemerintah dalam bidang pendidikan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat yang kurang mampu. Dimana program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) sangat relevan dalam membantu anak-anak yang berlatarbelakang ekonomi lemah. Sehingga adanya program Kartu Indonesia Pintar (KIP) tersebut memberikan peluang bagi masyarakat yang kurang mampu untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi tanpa mengkhawatirkan biaya pendidikannya. Namun, ketidaktepatan sasaran menjadi kendala untuk mengurangi masalah kemiskinan terlebih dibidang pendidikan. Sehingga dalam artikel ini ditegaskan bahwa perlunya evaluasi program-program pemerintah agar lebih efektif dan mengkaji bagaimana manfaatnya dari program tersebut dalam kehidupan masyarakat miskin.

Keywords: *Program Pemerintah, Kemiskinan, Kesejahteraan*

Article Information:

Received Date: 5 Mei 2025

Revised Date: 21 Juni 2025

Accepted Date: 23 Juni 2025

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu aspek terpenting bagi setiap masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Setiap masyarakat memiliki hak untuk menerima dan mendapatkan Pendidikan yang layak termasuk dari institusi-institusi pemerintah. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia yang tertuang pada pasal 31 ayat 1 mengatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan" (Fitri dan Fadia 2021). Dengan adanya Pendidikan yang diterima, setiap masyarakat dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh dirinya masing-masing. Karena pada dasarnya Pendidikan adalah jembatan bagi manusia untuk mencapai sebuah tujuan. Negara Indonesia berharap adanya Pendidikan dapat memfasilitasi para pelajar agar menjadi pribadi yang cerdas dan berkualitas. Namun, hal yang terjadi sampai saat ini Indonesia belum memberikan Pendidikan yang merata diseluruh daerah termasuk desa Manduamas. Manduamas adalah salah satu desa yang terletak pada Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa Manduamas terkenal akan kekayaan alamnya termasuk Pantai, air terjun, dan pegunungan.

Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, nelayan dan membuka usaha kecil-kecilan dipasar maupun dirumahnya masing-masing. Desa Manduamas masih tergolong daerah yang terpencil dimana masih banyak masyarakatnya mengalami kemiskinan salah satunya dibidang Pendidikan. Banyak anak-anak yang belum menerima hak pendidikannya karena keterbatasan biaya. Dengan demikian banyak anak yang lebih memilih kerja sebagai petani kebanding melanjutkan pendidikannya. Pada dasarnya seseorang yang ingin menempuh pendidikan memerlukan biaya yang cukup mahal. Karena di Indonesia semakin tinggi tingkat pendidikannya maka semakin mahal biaya pendidikannya. Inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan

masyarakat yang berlatarbelakang ekonomi lemah tidak mampu menempuh pendidikan. Tidak hanya tentang biaya, jarak tempuh kesekolah juga menjadi pemicu anak-anak tidak ingin melanjutkan pendidikannya. Karena tidak ada transportasi dari daerahnya kesekolah tersebut sehingga harus berjalan kaki. Sehingga anak-anak lebih memilih bekerja kebanding sekolah karena

dengan bekerja mereka mendapat upah dari atasannya (Agustina dan Salam 2019). Ditengah-tengah zaman yang semakin canggih ini biaya kebutuhan hidup pun semakin mahal. Masyarakat Manduamas kebanyakan bekerja sebagai petani dan nelayan yang hanya bergantung pada alam sehingga sering sekali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena penghasilan yang tidak pasti, dalam membiayai pendidikan anak-anaknya pun hingga ke perguruan tinggi menjadi salah satu hal yang sangat berat dan sulit untuk diwujudkan. Situasi inilah yang membuat anak-anak mereka harus mengorbankan mimpi dan kesempatan dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi demi memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar sehari-hari. Pemerintah memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya terlebih dibidang pendidikan. Pemerintah selalu berupaya memberikan kebijakan untuk mengatasi situasi yang dialami oleh masyarakat Manduamas yang masih tergolong miskin.

Adapun program-program yang sudah direalisasikan bagi masyarakat seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sejahtera(KIS). Kebijakan-kebijakan inilah yang sangat relevan bagi masyarakat yang tidak mampu dalam memenuhi biaya pendidikannya. Seperti bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sistemnya segala biaya pendidikan yang ditempuh oleh individu ditanggung oleh Pemerintah bahkan individu tersebut menerima uang Saku setiap bulannya. Program ini sangat membantu masyarakat

miskin dalam memperoleh pendidikan yang lebih tinggi hingga mewujudkan cita-citanya. Namun, yang menjadi tantangannya saat ini adalah program tersebut belum merata dan sering tidak tepat sasaran. Sehingga masih banyak masyarakat yang perlu dibantu untuk menempuh Pendidikannya melalui program tersebut. Hal ini menjadi tanggungjawab pemerintah sebagai pemimpin negara Indonesia yang mengusahakan kesejahteraan masyarakat Indonesia termasuk didesa Manduamas yang berlandaskan dengan cita-cita bangsa untuk mensejahterahkan kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga pemerintah juga perlu mengevaluasi program-program yang telah direalisasikan dan ketepatan sasarnya bagi masyarakat miskin.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam kehidupan manusia, pendidikan menjadi aspek yang memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas manusia. Karena melalui Pendidikan maka manusia dianggap akan memperoleh pengetahuan dan pengetahuannya diharapkan dapat membangun keberadaan hidupnya dengan lebih baik dan Sejahtera. Pada dasarnya, Pendidikan adalah suatu proses yang memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi individu melalui pembelajaran, pengalaman, dan Latihan. Adanya Pendidikan untuk mempersiapkan individu agar mampu berfungsi secara efektif dalam kehidupan sosialnya. Secara rasional, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi Pendidikan seseorang maka kualitas hidup manusia itu akan lebih baik, karena adanya pengetahuan yang diperoleh sehingga mampu untuk mengelolanya sendiri. Sedangkan menurut Undang-Undang Sisdiknas mengemukakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

bermasyarakat, bangsa dan negara (Nasution 2014). Adapun fungsi Pendidikan bagi kehidupan Masyarakat adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri, dapat mendorong kemajuan ekonomi negara tersebut, meningkatkan rasa toleransi dan kerukunan antar sesama manusia serta dapat mengurangi angka kemiskinan. Sedangkan menurut Hasan Langgulung, fungsi Pendidikan secara garis besar terbagi menjadi tiga yakni: pertama, menyiapkan generasi muda untuk memiliki kemampuan agar bisa memegang peranan-peranan pada masa yang akan datang ditengah kehidupan Masyarakat. Kedua, memindahkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peranan dari generasi tua ke generasi muda. Ketiga, memindahkan nilai-nilai generasi muda dengan tujuan agar keutuhan dan kesatuan Masyarakat terpelihara sebagai syarat utama berlangsungnya kehidupan suatu Masyarakat dan juga peradaban. Hal ini menekankan bahwa aspek Pendidikan sangat berperan penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Selain itu, Pendidikan yang berkualitas dan merata juga akan mempengaruhi kesejahteraan negara

Indonesia dan hal ini berdampak positif bagi kemajuan sebuah negara. Namun, realitanya yang terjadi dinegara Indonesia saat ini adalah Pendidikan yang tidak merata terlebih pada daerah yang pelosok dan terpencil serta biaya pendidikan yang terlalu mahal. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang kurang mampu untuk membiayai anaknya menempuh Pendidikan. Dengan demikian, Kemiskinan menjadi salah satu faktor yang menentukan seseorang mampu atau tidaknya dalam menempuh Pendidikan.

Menurut Cecep Fuadi (2023), salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial, tidak hanya karena tendensinya yang semakin meningkat, namun juga konsekuensinya yang tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi semata namun juga

masalah sosial dan instabilitas politik dalam negeri (Fuadi Ahmad, Suarna, dan Dwilestari 2023). Oleh karena itu, pengentasan masalah kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik dari bidang kesehatan maupun bidang pendidikan. Selama ini, pemerintah telah berusaha untuk memberikan solusi dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia dengan adanya program-program pemerintah baik berupa materi maupun nonmateri. Dalam kehidupan masyarakat aspek pendidikan menjadi hal terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan adalah suatu alat maupun sarana bagi diri seseorang untuk mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Aspek pendidikan tidak akan terlepas dari kehidupan masyarakat, karena hal ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tingkat pendapatan secara riil akan menurun jikalau terjadi inflasi dan akibatnya adalah penurunan tingkat konsumsi secara keseluruhan yang pada akhirnya akan menambah tingkat kemiskinan. Menurut Yoghi, tingkat pendapatan yang rendah akan mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang memadai dan tinggi dikarenakan masih mahal biaya pendidikan di Indonesia jika diukur dari rata-rata penghasilan masyarakat Indonesia (Citra Pratama 2014). Pendidikan yang rendah akan mengakibatkan tidak adanya skill dan potensi masyarakat untuk bisa lebih berdaya, yang mengakibatkan rendahnya produktivitas dari masyarakat dan pada akhirnya menghasilkan pendapatan yang minim, hal ini akan mengakibatkan terjadinya lingkaran kemiskinan.

Menurut Baidah yang menjadi rahasia umum dengan anggapan “semakin tinggi

pendidikan semakin tinggi pula biaya yang dikeluarkan”. Hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah, dikarenakan banyak masyarakat yang terdampak akibat mahal biaya pendidikan (Hijaya 2025). Mahalnya biaya pendidikan sangatlah membebani masyarakat Indonesia yang kebanyakan adalah lapisan menengah kebawah. Tak sedikit orang lebih memilih tidak sekolah dibandingkan harus mengeluarkan biaya yang besar. Adapula anak yang ingin bersekolah namun terkendala biaya sehingga terpaksa untuk berhenti sekolah.

Perlu diketahui bahwa biaya pendidikan yang mahal akan membuat ketidakmerataannya pendidikan di Indonesia dan akan berdampak buruk bagi masyarakat. Menurut Idris, permasalahan pendidikan ini akan berdampak terhadap segala aspek di kehidupan, akan merajalelanya pengangguran, marak kriminalitas, kemiskinan yang semakin meningkat, dan sebagainya. Untuk itu sangat diperlukan dukungan dan bantuan dari pemerintah bagi masyarakat yang tidak mampu memperoleh pendidikan. Pemerintah telah berupaya memberikan bantuan berupa program-program yang berkaitan dengan pendidikan. Termasuk program KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan sebagainya. Program tersebut sangat membantu masyarakat miskin dalam memperoleh pendidikan yang lebih tinggi.

Dalam konteks Pendidikan, terlihat konsep struktur Masyarakat yang dikemukakan oleh Karl Marx, yakni tentang Masyarakat kelas proletariat dan kelas borjuis. Pendidikan yang mahal dan tidak merata akan mempengaruhi Masyarakat kelas proletariat karena ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhannya terlebih dalam aspek Pendidikan. Sedangkan, Masyarakat kaum borjuis akan dengan mudahnya memperoleh Pendidikan yang lebih baik dan memperkuat struktur dimasyarakat tersebut. Masalah ini dapat memperburuk ketimpangan kelas sosial dimasyarakat terlebih kepada kelas bawah yakni kelas proletariat. Pendidikan yang mahal

dan tidak merata dapat menciptakan struktur sosial yang lebih terpolarisasi antara kelas proletariat dan kelas borjuis. Dengan demikian, untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi program pemerintah sangat berperan penting dalam mengatasi permasalahan tersebut. Bantuan Pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat membantu Masyarakat yang tidak mampu untuk menempuh Pendidikan. Dengan adanya peran Pemerintah dipastikan bahwa Pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan. Oleh karena itu, adanya program pemerintah melalui bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sangat berdampak besar bagi kehidupan Masyarakat terlebih kepada Masyarakat miskin.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian telaah Pustaka. Dimana teori dan pendapat-pendapat yang ada dalam penelitian ini merupakan hasil telaah dari artikel dan jurnal ilmiah yang masih relevan dengan penelitian ini. Sumber yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari hasil penelitian lainnya seperti buku, buku digital (e-book), artikel, jurnal dan sumber lainnya.

PEMBAHASAN

Pendidikan Dari Sudut Pandang Sosiologi

Karl Marx merupakan salah satu sosiolog yang berpengaruh bagi masyarakat, teorinya seperti kelas sosial, konflik, dan perubahan yang mendorong timbulnya gerakan sosial untuk menghapuskan masalah pengkelasan dalam masyarakat tersebut. Ia berpendapat bahwa kelompok masyarakat selalu ada stratifikasi sosial atau kelas-kelas sosial yang dapat memisahkan antara yang kaya dan miskin (Hendriwani 2020). Situasi tersebut menjadi permasalahan yang dialami oleh orang-orang miskin karena adanya kelas-kelas penguasa. Karl Marx (1867) berpendapat bahwa adanya pendidikan dapat memperkuat kelas-kelas sosial yang dibentuk oleh kelas penguasa. Karena pendidikan menjadikan individu mempertahankan posisinya di struktur masyarakat tersebut dengan kata lain

pendidikan dapat mempertahankan stratifikasi sosial yang terjadi di masyarakat (Zakia, Adisti, dan Asmarani 2022). Selain itu, Ia berpendapat bahwa akses pendidikan tidak selalu adil bagi seluruh masyarakat. Dimana masyarakat yang tergolong miskin tidak mudah dalam mendapat akses pendidikan sedangkan masyarakat yang tergolong kelas atas akan lebih mudah mendapat akses pendidikan yang lebih berkualitas. Bagi Karl Marx (1867), pendidikan berperan dalam pembentukan sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi dalam masyarakat dimana alat produksinya adalah milik individu dan digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk dipasarkan.

Sistem ini pada umumnya bertujuan untuk memperoleh sebuah keuntungan yang tinggi. Walaupun Ia menegaskan bahwa adanya pendidikan dapat memperkuat kelas-kelas sosial akan tetapi tidak selamanya pendidikan memberikan hal negatif bagi masyarakat. Ada beberapa hal positif yang mendukung teori Karl Marx terkait dengan aspek pendidikan. Seperti pendidikan dapat sebagai alat atau sarana individu untuk membebaskan dirinya dari sistem kelas-kelas sosial. Bagi kelas pekerja, adanya pendidikan dapat memberikan kesadaran secara penuh tentang posisi dan kondisi mereka yang tertindas dan dapat menciptakan sebuah kesadaran yang dapat mendukung perjuangan masyarakat menuju sebuah perubahan. Perubahan dapat terjadi karena adanya dorongan baik dari diri sendiri maupun kelompok sosial yang bertujuan untuk memperoleh suatu hasil yang lebih baik. Dengan demikian pendidikan sangat membantu masyarakat miskin untuk mengubah struktur masyarakat agar menciptakan sistem sosial yang lebih adil dan baik. Sehingga tidak adanya rasa membeda-bedakan masyarakat kelas bawah dengan kelas atas.

Program Pemerintah Dalam Mengurangi Kemiskinan di Manduamas

Pendidikan secara etimologi berasal kata dari bahasa Yunani yakni “paedagogie” yang artinya membimbing anak atau bimbingan kepada anak. Sedangkan dalam Bahasa Inggris dikatakan “to educate” artinya memperbaiki moral dan melatih pengetahuan (Dwijonagoro, Wulandari, dan Audiya 2024). Pendidikan menjadi salah satu sarana yang terpenting bagi masyarakat untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Suatu negara dapat dikatakan maju dan berkembang jika memiliki Pendidikan yang berkualitas. Hal ini diharapkan bagi para pelajar yang mampu menjadi penerus bangsa untuk memimpin Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Namun, realitanya Indonesia mengalami beberapa masalah yang mengakibatkan rendahnya kualitas Pendidikan di Negara Indonesia. Hal ini diakibatkan terjadinya kesenjangan sarana dan prasarana Pendidikan di daerah kota dan desa, kurangnya kualitas tenaga pengajar, rendahnya dukungan dari pemerintah, adanya pola pikir masyarakat yang kuno, dan kurangnya memfasilitasi media pembelajaran dalam mendukung proses pendidikan. Sehingga masyarakat Indonesia masih banyak yang belum mendapatkan hak pendidikannya. Sama seperti akses Pendidikan yang ada di desa Manduamas dimana masih banyak masyarakat yang belum merasakan Pendidikan yang tidak merata. Hal ini terjadi karena adanya masalah kemiskinan yang terjadi di desa tersebut. Kemiskinan adalah salah satu masalah sosial yang tidak dapat dipungkiri dari kehidupan masyarakat. Individu atau kelompok yang dikatakan miskin berarti tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kemiskinan terbagi menjadi empat jenis diantaranya sebagai berikut (Ulya 2018):

1. *Kemiskinan absolut artinya individu atau sekelompok masyarakat yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan.* Artinya masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Jika

dilihat dari situasi yang terjadi bagi Masyarakat di Manduamas, masih ada Sebagian Masyarakat yang memiliki pendapatan tapi tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar hidupnya.

2. *Kemiskinan relatif dapat dikatakan ketika masyarakat mengalami ketimpangan pendapatan akibat kebijakan pembangunan yang tidak merata dan tidak terjangkau diseluruh masyarakat.* Meskipun ada peningkatan di beberapa kebijakan Pembangunan dan layanan yang disediakan oleh Pemerintah tetapi hal tersebut tidak merata diseluruh Masyarakat Manduamas. Seperti Pendidikan yang tidak merata, layanan Kesehatan dan sebagainya. Hal inilah yang membuat terjadinya ketimpangan antara Masyarakat yang kaya dan miskin.

3. *Kemiskinan kultural artinya sikap dan tindakan dari masyarakat tersebut dipengaruhi oleh budayanya sendiri.* Artinya seseorang yang putus asa dan tidak ingin berusaha untuk mengubah kondisi kemiskinan yang dialaminya. Sebagian Masyarakat di Manduamas masih memiliki pandangan yang beranggapan bahwa mereka tidak bisa keluar dari masalah kemiskinan, sehingga tidak adanya usaha yang dilakukan untuk keluar dari masalah sosial yang mereka hadapi.

4. *Kemiskinan struktural.* Artinya kemiskinan terjadi akibat rendahnya sumber daya yang terjadi dalam sistem sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan melainkan menciptakan kemiskinan tersebut. Kebijakan yang diberikan Pemerintah terkadang tidak menjawab kebutuhan Masyarakat miskin. Karena adanya ketimpangan yang terjadi dan lebih memprioritaskan Masyarakat yang masih mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dibanding Masyarakat yang benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhannya dan yang tidak memiliki pekerjaan. Seperti Bantuan sosial berupa materi, bukannya Masyarakat miskin yang mendapatkannya melainkan Masyarakat yang mampu.

Pendidikan di Indonesia saat ini masih tergolong rendah, padahal aspek pendidikan adalah hal yang terpenting dan harus diperoleh oleh setiap masyarakat. Karena kualitas pendidikan menjadi salah satu faktor yang menentukan suatu negara itu maju. Namun realitanya, permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan saat ini adalah kurangnya pemerataan pendidikan di negara Indonesia terutama terhadap daerah-daerah yang masih bisa dikatakan tertinggal. Ketidakmerataan ini membuat masyarakat tidak mendapatkan haknya dalam menempuh pendidikan. Hal ini sering dialami oleh masyarakat miskin. Selain itu, biaya juga sebagai faktor penghambat bagi masyarakat dalam menempuh pendidikannya. Karena pada umumnya, semakin tinggi pendidikan semakin mahal biayanya. Sehingga tidak jarang banyak masyarakat yang miskin lebih memilih untuk bekerja kebanding harus mengeluarkan biaya untuk pendidikan. Salah satu daerah yang mengalami ketidakmerataan pendidikan di Indonesia adalah desa Manduamas dimana masih banyak masyarakatnya yang belum mendapat pendidikan yang merata dan layak. Masyarakat Desa Manduamas tidak ingin melanjutkan pendidikan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti biaya yang mahal, jarak tempuh yang jauh, kualitas pengajar yang rendah dan fasilitas sekolah yang kurang memadai. Dengan demikian pentingnya perhatian pemerintah mengenai situasi pendidikan di Indonesia terkhususnya di desa Manduamas yang saat ini mengalami kendala dalam sistem pendidikannya.

Pemerintah selalu berusaha untuk memberikan program yang terbaik dalam mengurangi masalah kemiskinan terkhusus dalam bidang pendidikan. Program-program yang sudah direalisasikan ataupun masih direncanakan tujuan utamanya adalah mengurangi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Pemerintah sudah menyalurkan bantuan sosial seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang saat ini masih berjalan dan dapat membantu masyarakat dalam menempuh

pendidikan yang lebih tinggi. Program ini disalurkan terlebih kepada masyarakat yang tidak bisa bersekolah atau tergolong miskin (Rohaeni dan Saryono 2018). Akan tetapi, masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkannya hal ini terjadi karena sebagian daerah salah sasaran dalam memberikan bantuan sosial tersebut. Ketidaktepatan sasaran ini membuat masyarakat miskin tidak dapat menerima hak pendidikannya. Untuk itu perlu nya pemerintah mengevaluasi program agar dapat mempertimbangkan penerima bantuan sosial tersebut dan relevansinya program pemerintah dalam mengurangi masalah kemiskinan terlebih di bidang pendidikan.

Struktur masyarakat akan selalu mempengaruhi posisi individu baik sebagai kelas atas, kelas tengah, dan kelas bawah. Sehingga perlunya pendidikan agar dapat mendorong individu maupun kelompok membawa perubahan yang lebih baik. Aspek pendidikan sangat penting bagi semua masyarakat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Banyaknya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia seperti masyarakat Desa Manduamas karena minimnya fasilitas pendidikan. Untuk itu adanya program-program pemerintah sangat membantu masyarakat miskin dalam mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berkualitas baik dari segi tenaga pengajarnya, kurikulum sekolah, dan sarana maupun prasarana mendukung proses belajar. Program pemerintah sangat membantu dan masih relevan saat ini adalah program KIP (Kartu Indonesia Pintar). Adanya program tersebut masyarakat miskin memiliki peluang besar untuk mendapatkan pendidikan yang baik bahkan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Saat ini sudah banyak lulusan-lulusan dari perguruan tinggi yang menggunakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Hal ini sebagai bukti bahwa program tersebut masih sangat relevan bagi masyarakat miskin. Adanya program KIP bertujuan untuk

membantu masyarakat miskin agar dapat memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak dan baik, menghindari putus sekolah, membantu dalam pemenuhan kebutuhan kegiatan belajar, dan mendukung wajib belajar 12 tahun dan menciptakan generasi yang berkualitas dan berkarakter. Pemerintah selalu berupaya memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia terlebih di daerah-daerah yang terpencil seperti Desa Manduamas. Program tersebut sudah direalisasikan bagi seluruh masyarakat miskin. Namun, bantuan yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran seperti masih ada beberapa individu maupun dikelompok masyarakat yang mendapatkan program KIP akan tetapi individu tersebut dapat digolongkan sebagai masyarakat mampu untuk memenuhi biaya pendidikannya. Sehingga perlunya evaluasi program pemerintah agar tidak terjadinya ketimpangan antara masyarakat yang satu dengan lainnya. Dan sasaran dari program pemerintah tersebut harus tepat pada orang-orang yang lebih membutuhkan bantuan. Sehingga dapat menciptakan dan membentuk para generasi muda yang berpotensi, berkualitas dan berkarakter dan sebagai bibit yang akan memimpin negara Indonesia kedepannya.

Tingkat kesejahteraan suatu negara diukur dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Masyarakat harus menyadari bahwa ketiga aspek tersebut penting dalam kehidupan sehari-hari (Sari dan Pratiwi 2018). Salah satunya aspek pendidikan yang menjadi tolak ukur bahwa suatu negara itu maju atau sedang berkembang. Ada beberapa kontribusi pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Pendidikan yang berkualitas menciptakan sumber daya manusia yang lebih terampil, berkarakter dan berkualitas. Sumber daya yang berkualitas sebagai ukuran bahwa

negara itu maju karena telah menciptakan para generasi muda yang akan membawa negara Indonesia lebih baik dari sebelumnya.

2. Mengurangi Kemiskinan
Pendidikan yang berkualitas dapat menjadi alat untuk mengurangi masalah kemiskinan yang terjadi di negara Indonesia. Pendidikan berpeluang besar dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup masing-masing.
3. Menciptakan sistem sosial yang setara.
Pendidikan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat agar dapat menciptakan struktur maupun sistem masyarakat yang tidak merata. Sehingga adanya pendidikan dapat membantu masyarakat keluar dari lapisan-lapisan antara yang kaya dan miskin.
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
Kesehatan menjadi salah satu aspek terpenting dalam kehidupan masyarakat sehingga adanya pendidikan dapat mendukung dan meningkatkan kesadaran bahwa kesehatan, baik gizi maupun pola hidup sehat penting untuk diterapkan dan diperhatikan. Adanya pendidikan masyarakat dapat memahami bahwa pentingnya menjaga kesehatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sumbangsih pendidikan dalam bidang kesehatan sangat penting bagi seluruh masyarakat.
5. Memberantas Pengangguran
Pendidikan berpengaruh besar untuk mengurangi masalah pengangguran yang terjadi di Negara Indonesia. Individu maupun kelompok masyarakat yang mendapat pendidikan berkualitas dan layak akan dapat menciptakan generasi-generasi muda yang mampu mengembangkan potensinya masing-masing. Sehingga

pendidikan yang berkualitas akan mengurangi masalah pengangguran yang terjadi di negara Indonesia terkhususnya di Desa Manduamas. Dengan demikian, aspek pendidikan berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat Negara Indonesia.

Judul Artikel	Penulis	Tahun	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Utama
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat Di Desa Made Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang	Nia Agustina, Santri Salam	2019	Agar mengetahui apa saja yang menjadi faktor rendahnya pendidikan masyarakat	Metode Kualitatif: Observasi, wawancara dan studi dokumen	Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya Tingkat pendidikan masyarakat Desa Made antara lain motivasi pemuda yang rendah, kondisi sosial masyarakat, dan kondisi ekonomi.
Permasalahan Pendidikan Dan Solusinya di Indonesia	Samsul Hadi Dwijonagoro, Aniza Wulandari, Frizka Rizty Audiyana	2024	Untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan	Metode studi literasi atau kajian kepustakaan	Permasalahan yang menyebabkan pendidikan di Indonesia rendah diantaranya kurikulum yang membungkakan, pendidikan yang kurang merata,

					masalah penempatan guru, dan rendahnya kualitas guru.
Problematika Kualitas Pendidikan di Indonesia	Siti Fadiah Nurul Fitri	2021	Supaya mengetahui apa yang menjadi problematika rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia	Metode studi literasi atau kajian kepustakaan	Problematika rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidikan, dan tidakmeratanya pendidikan.
Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar(KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan	N Eni Rohaeni, Oyon Saryono	2018	Untuk mengetahui apa yang menjadi dampak kebijakan Pemerintah melalui program KIP dalam upaya pemerataan pendidikan di Indonesia	Metode Kualitatif	Implementasi dari program Pemerintah melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sangat membantu masyarakat miskin dalam memperoleh pendidikan yang merata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kemiskinan menjadi salah satu masalah sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Seperti Desa Manduamas yang saat ini mengalami masalah kemiskinan baik dibidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Ketiga aspek tersebut sama-sama penting dalam kehidupan bermasyarakat dan juga merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Pendidikan menjadi sarana yang digunakan maupun dimanfaatkan guna untuk mengembangkan potensi seseorang. Negara Indonesia mengakui bahwa sistem pendidikan yang berlaku saat ini kurang konsisten dan kurang berkualitas. Jika dilihat dari sudut pandang Karl Marx tentang Pendidikan yang kurang merata dapat memperburuk ketimpangan yang terjadi bagi Masyarakat di Manduamas. Karena adanya Pendidikan yang tidak merata kelas proletariat akan sulit dalam mengakses Pendidikan. Pada umumnya, Pendidikan menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Masyarakat untuk menjalani kehidupannya. Pendidikan yang berkualitas akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat dan bangsa. Namun, dalam sistem pendidikan yang berlaku sampai saat ini belum merata dan kurang memfasilitasi baik dari sarana maupun prasarana yang mendukung proses penerimaan pendidikan tersebut. Pendidikan yang kurang merata, kualitas pendidikannya dan tenaga pengajar serta biaya pendidikan yang mahal menjadi kendala bagi masyarakat Desa Manduamas dalam menempuh pendidikan. Tidak dapat dipungkiri, banyak masyarakat yang tergolong miskin lebih memilih untuk bekerja kebanding sekolah. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa dengan bekerja mereka dengan cepat menghasilkan uang kebanding menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi, perlunya pendidikan dalam menentukan masa depan sebuah negara dan Masyarakat tersebut. Namun, biaya pendidikan menjadi salah satu kendala bagi masyarakat miskin dalam menempuh pendidikan karena pada

dasarnya semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin mahal biaya yang harus ditanggung oleh individu tersebut. Jika dilihat dari sisi masyarakat yang lemah ekonominya mungkin tidak dapat untuk memenuhi membiayai pendidikan anaknya hingga ke perguruan tinggi. Sehingga mereka harus mengorbankan cita-cita dan harapan mereka. Karena situasi tersebut mereka lebih memilih untuk bekerja kebanding menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

Pendidikan bukan hanya sekedar proses pembelajaran yang kita terima, tetapi menjadi alat bagi seseorang untuk menentukan masa depannya. Permasalahan ini tidak terlepas dari tanggungjawab pemerintah sebagai pemimpin negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia terlebih dalam bidang pendidikan. Sampai saat ini, kontribusi yang diberikan oleh pemerintah melalui program-program yang direalisasikan bagi masyarakat miskin seperti bantuan KIP (Kartu Indonesia Pintar). Program tersebut sangat relevan dalam membantu masyarakat miskin untuk menerima pendidikan yang lebih baik dan layak. Dengan adanya program yang diberikan Pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar sangat berdampak baik bagi Masyarakat miskin dalam mengakses Pendidikan yang lebih tinggi. Akan tetapi, yang menjadi kendala saat ini adalah ketidaktepatan sasaran. Ketidaktepatan sasaran ini membuat masyarakat yang sangat membutuhkan tidak mendapatkan pendidikan. Sehingga perlunya evaluasi dari program pemerintah tersebut agar sasarannya tepat pada masyarakat yang layak untuk menerimanya. Dan karena program tersebut banyak memberikan kontribusi dan masih sangat relevan bagi masyarakat di Manduamas yang masih tergolong miskin.

Saran

Pemerintah seharusnya memperbaiki sistem pendataan Masyarakat miskin yang valid dan benar. Sehingga penyaluran bantuan Pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar(KIP) benar-benar dan tepat sasarannya kepada

Masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan tersebut. Dengan demikian, penyaluran bantuan tersebut pun jadi lebih tepat dan relevan.

REFERENSI

- Agustina, Nia, dan Santri Salam. 2019. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat Di Desa Made Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang" 1 (1): 211–18.
- Baidah, Mislaini, dan Damilsi Hijaya. 2025. "Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia." *Jurnal Inspirasi Pendidikan* 3 (1): 46–54.
- Citra Pratama, yoghi. 2014. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 4 (2): 210–23.
- Dwijonagoro, Hadi Samsul, Aniza Wulandari, dan Rizty Frizka Audiya. 2024. "Permasalahan Pendidikan Dan Solusinya di Indonesia." *Baksooka: Jurnal Penelitian Ilmu Sejarah, Sosial dan Budaya* 3 (1): 1–14.
- Fitri, Nurul, dan Siti Fadia. 2021. "Problematika Kualitas Pendidikan di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5 (1).
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3882476>.
- Fuadi Ahmad, Cecep, Nana Suarna, dan Gifthera Dwilestari. 2023. "Klasifikasi Data Kemiskinan Menggunakan Metode Naïve Bayes Untuk Mengetahui Tingkat Kemiskian Studi Kasus: Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Majalengka." *Jurnal Informatika dan Teknologi Informasi* 2 (2): 203–8.
- Hendriwani, Subur. 2020. "Teori Kelas Sosial dan Marxisme Karl Marx." *Jurnal Kalam dan Filsafat* 2 (1): 13–28.
- Nasution, Efrizal. 2014. "Problematika Pendidikan di Indonesia." *Jurnal Mediasi* 8 (1): 10.
- Rohaeni, N Eni, dan Oyon Saryono. 2018. "Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan" 2 (1).
- Sari, Meri Enita Puspita, dan Diah Ayu Pratiwi. 2018. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam." *JURNAL TRIAS POLITIKA* 2 (2): 137.
<https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1464>.
- Ulya, Husna Ni`matul. 2018. "Paradigma Kemiskinan Dalam Perspektif Islam Dan Konvensional." *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1 (1): 129.
<https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i1.1448>.
- Zakia, Ardiva, Asri Ayu Adisti, dan Aulia Asmarani. 2022. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelas Sosial: Gaya Hidup, Daya Beli Dan Tingkat Konsumsi" 3 (5).